

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (*Audited*). Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12,000,000.00 atau sebesar 100.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp12,000,000.00. Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12,000,000.00 atau mencapai 100.00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp82,350,445,094.00 atau mencapai 96.16 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp85,640,380,146.00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp81,155,201,654.00 atau 96.16 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp1,195,243,440.00 atau 95.84 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12,000,000.00 dan Belanja sebesar Rp82,350,445,094.00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp82,338,445,094.00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (<i>Audited</i>)		Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)		Tahun Anggaran 2021 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja	85,640,380,146.00	82,350,445,094.00	75,717,140,009.00	70,521,110,975.00
Belanja Operasi	84,393,314,741.00	81,155,201,654.00	75,264,956,221.00	70,103,480,217.00
Belanja Pegawai	40,061,109,042.00	39,183,471,101.00	34,176,864,642.00	33,863,478,434.00
Belanja Barang dan Jasa	44,332,205,699.00	41,971,730,553.00	41,088,091,579.00	36,240,001,783.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal	1,247,065,405.00	1,195,243,440.00	452,183,788.00	417,630,758.00
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,046,222,405.00	995,183,440.00	404,159,500.00	376,886,458.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,843,000.00	200,060,000.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	48,024,288.00	40,744,300.00
Surplus/(Defisit)-LRA	(85,628,380,146.00)	(82,338,445,094.00)	(75,705,140,009.00)	(70,509,110,975.00)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,753,803,752.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp273,198,559.00, Aset Tetap sebesar Rp15,276,132,588.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp204,472,605.00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56,521,980.00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15,697,281,772.00.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Aset Lancar	273,198,559.00	76,196,423.00
Aset Tetap	15,276,132,588.00	16,484,310,136.52
Aset Lainnya	204,472,605.00	204,472,605.67
Jumlah Aset	15,753,803,752.00	16,764,979,165.19
Kewajiban Jangka Pendek	56,521,980.00	63,770,537.00
Jumlah Kewajiban	56,521,980.00	63,770,537.00
Ekuitas	15,697,281,772.00	16,701,208,628.19
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	15,753,803,752.00	16,764,979,165.19

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12,000,000.00, Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp83,894,363,246.00, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp83,882,363,246.00).

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Pendapatan-LO	12,000,000.00	12,000,000.00
Bebans	83,894,363,246.00	73,876,896,276.57
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(83,882,363,246.00)	(73,864,896,276.57)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Pos Luar Biasa	0.00	0.00
Surplus/(Defisit)-LO	(83,882,363,246.00)	(73,864,896,276.57)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16,701,208,628.19, Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp83,882,363,246.00), RK PPKD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82,338,445,094.00, RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp431,131,500.00), RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp413,267,958.33, Ekuitas Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp557,854,837.48, dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15,697,281,772.00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Ekuitas Awal	16,701,208,628.19	19,694,326,565.70
Surplus/(Defisit)-LO	(83,882,363,246.00)	(73,864,896,276.57)
RK PPKD	82,338,445,094.00	70,509,110,975.00
RA PPKD (Perolehan)	(431,131,500.00)	416,160,000.00
RA PPKD (Penyusutan)	413,267,958.33	(264,435,000.00)
Ekuitas	557,854,837.48	210,942,364.06
Ekuitas Akhir	15,697,281,772.00	16,701,208,628.19

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.